



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 293 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

- KETIGA** : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Instansi Pemerintah.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. ASMAT  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A.	TENAGA KESEHATAN	51	
1.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN   SUB BAGIAN PROGRAM
2.	APOTEKER AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KAB. ASMAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH   APOTEK
3.	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS BEDAH-BEDAH ONKOLOGI	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF	2	PEMERINTAH KAB. ASMAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
5.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
6.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIK	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
7.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
8.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
9.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
10.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
11.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
12.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
13.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
14.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS TOMOR
15.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS AYAM
16.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS SAWA ERMA
17.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS MUMUGU
18.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS PRIMAPUN
19.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS NAKAI
20.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS BINAM
21.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS KOLF BRAZA
22.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS COMORO
23.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS YAOSAKOR
24.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS ATSJ
25.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS BASIM
26.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS SAFAN   PUSKESMAS BAYUN
27.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS KAMUR
28.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS AGATS

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
29.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS SAFAN   PUSKESMAS BAYUN
30.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS AGATS
31.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH   DOKTER GIGI
32.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS SAWA ERMA
33.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS PRIMAPUN
34.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS ATSJ
35.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS TOMOR
36.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS COMORO
37.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS KOLF BRAZA
38.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS YAOSAKOR
39.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS KAMUR
40.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS MUMUGU
41.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS BASIM
42.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS SAWA ERMA
43.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS UNIR SIRAU
44.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS NAKAI
45.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS AYAM
46.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS AGATS
47.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   PUSKESMAS DISTRIK   PUSKESMAS BINAM
48.	RADIOGRAFER TERAMPIL	2	PEMERINTAH KAB. ASMAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH   RADIOLOGI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B.	TENAGA TEKNIS		197	
1.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG   BIDANG PEMERINTAHAN KAMPUNG   SEKSI FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KAMPUNG DAN KERJASAMA KAMPUNG
2.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN HUKUM
3.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN LEGISLASI DAN PERSIDANGAN   SUB BAGIAN ANALISIS PRODUK HUKUM DAERAH
4.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH   BIDANG EKONOMI   SUB BIDANG ANALISA PERENCANAAN & PROGRAM KERJA BIDANG EKONOMI
5.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG   BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KAMPUNG   SEKSI PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN TENAGA PENDAMPING
6.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PAJAK ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 STATISTIKA	2	PEMERINTAH KAB. ASMAT   BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH   SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH   SUB BAGIAN KEUANGAN
7.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN PAJAK ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 STATISTIKA	3	PEMERINTAH KAB. ASMAT   BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   BIDANG ANGGARAN   SUB BIDANG ANGGARAN
8.	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR ; S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 TEKNIK SIPIL	2	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   BIDANG PERUMAHAN RAKYAT   SEKSI EVALUASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN RAKYAT
9.	ANALIS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 STUDI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN   SEKSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN
10.	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 SOSIOLOGI	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR   SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN SELEKSI JABATAN
11.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	6	PEMERINTAH KAB. ASMAT   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   SUB BAGIAN UMUM
12.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH   SUB BAGIAN UMUM
13.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   SUB BAGIAN UMUM
14.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
15.	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN ; D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III ADMINISTRASI LAYANAN KESEHATAN ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN   BAGIAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH   SUB BAGIAN PENATAAN & PENGELOLAAN KEARSIPAN
16.	ASISTEN PELATIH OLAHRAGA PEMULA	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA/SMA SEDERAJAT	11	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA   BIDANG PEMBINAAN DAN PRESTASI OLAH RAGA   SEKSI PEMBUDDIDAYAAN OLAH RAGA
17.	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; D-IV ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU HUKUM ; D-IV AKUNTANSI ; S-1 AKUNTANSI ; D-IV ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 ADMINISTRASI PAJAK ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV MANAJEMEN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	2	PEMERINTAH KAB. ASMAT   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV
18.	MEDIK VETERINER AHLI	PROFESI DOKTER HEWAN	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS TANAMAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
	PERTAMA			PANGAN DAN PERTANIAN   BIDANG TANAMAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN   SEKSI PENGEMBANGAN TANAMAN HORTIKULTURA
19.	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	17	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   BIDANG PELAYANAN KESEHATAN   SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
20.	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	S-1 KRIYA SENI ; S-1 SENI MURNI ; S-1 SENI MUSIK ; S-1 SENI RUPA ; S-1 TATA KELOLA SENI ; S-1 SENI PERTUNJUKAN ; S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; S-1 DESAIN INTERIOR	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN   BIDANG KEBUDAYAAN DAN PENDAMPINGAN ADAT   SEKSI PELESTARIAN NILAI-NILAI ADAT
21.	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR ; D-IV TEKNIK SIPIL ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	2	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   BIDANG PERUMAHAN RAKYAT   SEKSI PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN RAKYAT
22.	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 PERIKANAN ; S-1 BUDIDAYA PERIKANAN ; S-1 ILMU PERIKANAN ; S-1 PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	2	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN   BIDANG PERIKANAN TANGKAP   SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN TANGKAP
23.	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	9	PEMERINTAH KAB. ASMAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   BAGIAN PEMERINTAHAN   SUB BAGIAN ADMINSTRASI PEMERINTAHAN
24.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 SISTEM INFORMASI	3	PEMERINTAH KAB. ASMAT   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN   SUB BIDANG ANALISIS KEBUTUHAN DAN FORMASI PEGAWAI
25.	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 KEPENDUDUKAN ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU MANAJEMEN ; S-1 KEPENDUDUKAN DAN STATISTIK	3	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL   SEKSI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN
26.	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 SASTRA INGGRIS	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI DAN UMUM   BAGIAN PROTOKOL   SUB BAGIAN PROTOKOL
27.	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ; S-1 SASTRA INGGRIS	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   SEKRETARIAT DPRD   BAGIAN UMUM SETWAN   SUB BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
28.	PENATA LAKSANA AGRARIA DAN TATA RUANG	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III GEOGRAFI ; D-III PERTANIAN ; D-III MANAJEMEN ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III STATISTIK ; D-III TEKNIK ARSITEKTUR ; D-III TEKNIK SIPIL ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III SURVEI DAN PEMETAAN ; D-III STUDI PEMBANGUNAN DAN MANAJEMEN	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG TATA RUANG   SEKSI PENYUSUNAN TATA RUANG
29.	PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMK BISNIS KONSTRUKSI DAN PROPERTI ; SMK ELEKTRO OTOMOTIF	10	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN   BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN   SEKSI PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KAWASAN PERMUKIMAN
30.	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMK BISNIS KONSTRUKSI DAN PROPERTI ; SMK TEKNIK ALAT BERAT	10	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG BINA MARGA   SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
31.	PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT	10	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS LINGKUNGAN HIDUP   BIDANG PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN   SEKSI KEMITRAAN LINGKUNGAN
32.	PENATA LAKSANA SUMBER DAYA AIR PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMK	10	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG CIPTA KARYA   SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH
33.	PENGAMAT TERA PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMK TEKNIK	10	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA   BIDANG PERINDUSTRIAN   SEKSI BIMBINGAN PRODUKSI, USAHA DAN SARANA
34.	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGROBISNIS ; D-IV PERTANIAN ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; S-1 PENYULUHAN PERTANIAN ; S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN ; S-1 TEKNIK HASIL PERTANIAN	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS TANAMAN PANGAN DAN PERTANIAN   BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERTANIAN   SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
35.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 SOSIOLOGI	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   INSPEKTORAT   INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
36.	PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI PERTAMA	D-IV PERIKANAN ; D-IV BUDIDAYA PERIKANAN ; S-1 BUDIDAYA PERIKANAN ; S-1 PERIKANAN	2	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN   BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA   SEKSI PERBENIHAN DAN BUDIDAYA IKAN
37.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III AKUPUNTUR ; D-III ANALIS KESEHATAN ; D-III AUDILOGI ; D-III FARMASI ; D-III FISIOTERAPI ; D-III GIZI ; D-III KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-III KESEHATAN GIGI	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KESEHATAN   BIDANG PELAYANAN KESEHATAN   SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
38.	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN ; D-III AKUPUNTUR ; D-III FARMASI ; D-III FISIOTERAPI ; D-III GIZI ; D-III	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		KEBIDANAN ; D-III KEPERAWATAN ; D-III KESEHATAN LINGKUNGAN ; D-III KEPERAWATAN GIGI ; D-III KESEHATAN GIGI		
39.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ; D-IV ANALISIS KEUANGAN ; D-IV KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PAJAK ; D-IV KEUANGAN PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 ADMINISTRASI BISNIS ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	2	PEMERINTAH KAB. ASMAT   SEKRETARIAT DAERAH   ASISTEN BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN   BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA   SUB BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG & JASA
40.	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI PERTAMA	D-IV PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ; S-1 ILMU PERIKANAN ; S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN ; D-IV PENYULUH PERIKANAN	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN   BIDANG PERIKANAN TANGKAP   SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
41.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG   BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT   SEKSI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
42.	PENYULUH NARKOBA AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; D-IV KOMUNIKASI MASSA ; S-1 HUKUM ; S-1 EKONOMI ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 KRIMINOLOGI	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS SOSIAL   BIDANG REHABILITASI SOSIAL   SEKSI REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA
43.	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 PENYULUHAN PERTANIAN ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; S-1 PERKEBUNAN ; S-1 TEKNIK PERTANIAN	3	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS TANAMAN PANGAN DAN PERTANIAN   BIDANG TANAMAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN   SEKSI PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN
44.	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	D-III AGROEKOTEKNOLOGI ; D-III AGRIBISNIS ; D-III AGROTEKNOLOGI ; D-III BUDIDAYA PERTANIAN ; D-III PETERNAKAN ; D-III TEKNIK PERTANIAN	3	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS TANAMAN PANGAN DAN PERTANIAN   BIDANG TANAMAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN   SEKSI PENGEMBANGAN TANAMAN HORTIKULTURA
45.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SEKOLAH MENENGAH ANALIS KIMIA ; SEKOLAH MENENGAH TEKNOLOGI INDUSTRI (SMTI) ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMA IPA ; SMK	10	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG TATA RUANG   SEKSI PENATAAN DAN PEMANFAATAN RUANG
46.	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA KEJURUAN ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK ; SMK TEKNIK	25	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
47.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN   BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   SEKSI APLIKASI INFORMATIKA
48.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	2	PEMERINTAH KAB. ASMAT   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN   SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
49.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS TANAMAN PANGAN DAN PERTANIAN   SEKRETARIAT DINAS TANAMAN PANGAN DAN PERTANIAN   SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
50.	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III MANAJEMEN ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	2	PEMERINTAH KAB. ASMAT   BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR   SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
51.	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH ; S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG TATA RUANG   SEKSI PENATAAN DAN PEMANFAATAN RUANG
52.	TEKNISI MESIN ALAT BERAT	D-III ALAT BERAT ; D-III ELEKTRONIKA INDUSTRI ; D-III OTOMASI SISTEM PERMESINAN ; D-III PEMELIHARAAN ALAT BERAT ; D-III PEMELIHARAAN MESIN ; D-III TEKNIK MESIN ; D-III TEKNIK ELEKTRONIKA ; D-III TEKNIK ELEKTRO	10	PEMERINTAH KAB. ASMAT   DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   BIDANG CIPTA KARYA   SEKSI BINA KONSTRUKSI